BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Indonesia sendiri terdiri dari banyak desa dengan beragam potensi yang dapat dikembangkan untuk memajukan pembangunan ekonomi Indonesia. Perkembangan Indonesia sudah sangat baik. Pembangunan sering identik dengan proses mengubah atau memperbaiki kondisi secara sistematis. Pembangunan adalah upaya untuk mencapai kemajuan umum umat manusia, pembangunan sering dikaitkan dengan perwujudan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terfokus pada pembangunan saja melainkan juga pada pembangunan umum juga. Dengan cara ini, kita dapat melihat bagaimana pemerintah Indonesia telah mencapai tujuan pembangunannya. Desa sendiri merupakan bagian dari sistem dan taraf hidup masyarakat meningkat. Dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik merupakan tujuan dari penggunaan dana desa.

Provinsi Bali ialah sebuah provinsi di Indonesia dengan penerima dana desa dari dinas setempat. Berikut ini adalah penyaluran dana desa di setiap kabupaten di Provinsi Bali, yang telah tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Dana Desa Tahun Anggaran 2018-2020 Provinsi bali

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Badung	46	42.439.183	52.584.767	56.217.010
2.	Bangli	68	52.826.236	61.334.645	63.492.227

3.	Buleleng	129	106.882.607	124.026.738	127.185.229
4.	Gianyar	64	51.971.543	59.992.299	62.324.665
5.	Jembrana	41	39.664.910	49.048.178	52.061.098
6.	Karangasem	75	64.376.212	78.718.974	82.614.181
7.	Klungkung	53	43.266.021	51.533.982	54.067.541
8.	Tabanan	133	102.310.276	118.204.542	122.922.870
9.	Denpasar	27	27.404.975	34.750.461	36.913.390
Jumlah		636	531.141.963	630.194.586	657.798.211

Sumber: *DJPK.Depkeu. 2021*

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyaluran dana di tingkat desa di berbagai kabupaten di Provinsi Bali terhadap besaran pendapatan dari peruntukan dana di tingkat desa meningkat setiap tahun. Salah satunya terjadi di Kabupaten Tabanan. Seperti terlihat dari tabel di atas, pendapatan tahunan Dana Desa Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, Tabanan menerima subsidi keuangan sebesar 102.310.276 rupiah dari desa. Pada tahun 2019, Tabanan menerima hibah keuangan pedesaan sebesar Rs 118.204.542, menghasilkan peningkatan sebesar Rs 15.894.266. Pada tahun 2020, Kabupaten Tabanan menerima dana desa sebesar Rp 122.922.870, sehingga dari tahun 2019 hingga 2020 meningkat sebesar Rp 4.718.328. Oleh karena itu, dari tahun 2018 hingga 2020, alokasi dana desa di Kabupaten Tabanan akan selalu meningkat. Besarnya distribusi dana desa yang dialokasikan oleh anggaran fiskal pusat telah memungkinkan banyak desa untuk menerapkan pengelolaan yang profesional, yang menyiratkan pengelolaan keuangan yang berkualitas di tingkat desa.

Kabupaten Tabanan merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di Bali, dengan jumlah 133 desa. Kabupaten Tabanan merupakan daerah yang menerima dana yang dialokasikan oleh pemerintah dari APBN. Kota Tabanan juga merupakan kota yang paling banyak didanai di desa pada tahun 2016 dan 2017. Menurut data BPMD Kabupaten Tabanan tahun 2020, dana desa di Kabupaten

Tabanan sudah terserap dengan baik, dan rasio penyerapan alokasi dana desa sebesar 85%.

Boediarso Teguh Widodo, Direktur Bidang Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, juga mengatakan rendahnya penyerapan dana di tingkat desa karena ada banyak desa yang tidak atau belum mengetahui bagaimana cara merumuskan pendapatan dan belanja desa. anggaran (APBDes). Inilah syarat penyaluran dana di tingkat desa. Tentu hal ini akan menghambat keberhasilan pengelolaan dana yang dialokasikan di tingkat desa. Di sisi lain, dengan meningkatnya anggaran di tingkat desa dari tahun ke tahun, kemungkinan terjadinya kecurangan kader desa dalam mengelola dana di tingkat desa akan semakin meningkat, dan akan terjadi kasus penyalahgunaan dana di tingkat desa. yang akan menghalangi berfungsinya tingkat pemerintahan dari penciptaan kondisi yang baik. Pemerintahan.

Kasus terkait pengelolaan dana desa dalam penelitian ini terjadi di Kabupaten Tabanan salah satunya terjadi di Desa Akah Kecamatan Salemad Barat. Kepala desa itu diduga menggelapkan APBDes 2019 senilai Rp.250 juta. Diambil dari kegiatan dan proyek desa, dan sumbernya berasal dari dana dan anggaran desa. Kasus ini terungkap setelah pajak yang seharusnya dibayarkan tidak benar-benar dibayarkan dan kasus tersebut menghambat keberhasilan pengelolaan dana di tingkat desa (www.balipost.com).

Kemarin, rencana tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana tingkat desa sejak 2015 dapat berdampak signifikan terhadap desa setempat, mengubah desa tertinggal menjadi desa maju, dan desa maju menjadi desa mandiri

(Maharani, 2019). Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan desa, pengelolaan dana desa harus mengikuti prinsip good governance.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor utama keberhasilan pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat meliputi proses partisipasi masyarakat, yang meliputi identifikasi masalah dan kemungkinan dalam masyarakat, pemilihan dan pengembangan solusi alternatif masalah, dan upaya mengatasi masalah dalam solusi reformasi dan partisipasi masyarakat. Ini adalah cara partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam keberhasilan rencana pembangunan. Mahayani (2017) menunjukkan cara untuk mendapatkan informasi tentang situasi, kebutuhan, dan perilaku masyarakat lokal. Ketika masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan persiapan pembangunan, hal itu meningkatkan kepercayaan terhadap rencana pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas. Ini adalah tiga karakteristik penting dari keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini ikut serta dalam pengelolaan uang desa merupakan suatu penipuan, dan peran serta masyarakat sangat diperlukan.

Masalah lain dengan partisipasi masyarakat yang dihadapi desa Jatilwi pada tahun 2020 adalah program perencanaan desa tidak berjalan sesuai rencana karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola dana desa. Sehingga Program tidak dapat terselesaikan dengan tepat. Partisipasi mayarakat pada pembangunan infrastruktur desa, dimana partisipasi pada rangka menerima berita yg seksama mengenai aplikasi pembangunan mulai berdasarkan perencanaan, aplikasi, dan monitoring ketika pelaporan.

Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari keberadaannya agar memiliki keinginan untuk ikut serta dalam pembangunan negara bersama pemerintah.

Partisipasi masyarakat tidak lagi menjadi kewajiban, tetapi masyarakat berhak untuk berpartisipasi secara langsung pada rencana dan kegiatan dihadapinya, sehingga dapat dengan leluasa menentukan kegiatan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat desa sejahtera, pemerintah desa yang bertenaga dengan kualitas hayati warga desa yang layak sebagai asa tertinggi.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan rencana pembangunan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk membangun desa yang memenuhi kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan rencana pembangunan, tetapi juga mengidentifikasi masalah dan kemungkinan yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, kegiatan pembangunan akan gagal. Seperti halnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa, partisipasi ini sangat penting. Perhatian lebih dapat diberikan pada penggunaan dan pengelolaan dana, yang lebih sesuai dengan pendapatan aktual dana di tingkat desa. Oleh karena itu, peran serta masyarakat desa merupakan kunci sukses tidaknya pembangunan desa.

Uceng (2019), Masruni (2019), dan Periansyah (2020) melakukan penelitian terkait variabel partisipasi masyarakat, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Namun berbeda dengan hasil Tumbel (2017), keberhasilan pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.

Faktor kedua bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa terpengaruh oleh adanya penggunaan siskeudes. Siskeudes ialah salah satu proses perbaikan

pemerintah untuk mengelola keuangan serta pertanggungjawaban dana desa menjadi efektif, efisien dan transparan. Harahap (2013) Beberapa orang mengklaim bahwa keberadaan yong akan mempengaruhi pembangunan, positioning dan pemberdayaan masyarakat pedesaan karena tidak akan berfungsi dengan baik tanpa perencanaan keuangan yang baik. Sistem informasi merupakan bagian penting dari sebuah organisasi.

Masalah lain dalam penggunaan sistem keuangan desa adalah tidak semua desa dapat berfungsi seperti yang dilakukan di Kabupaten Tabanan. Kabupaten yang seluruh desanya telah membentuk rancangan dalam hal pengelolaan keuangan desa. Namun di seluruh desa di Kabupaten Tabanan masih terdapat beberapa desa yang belum menggunakan aplikasi siskeudes karena keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa.

Implementasi sistem ini kemudian akan membantu sistem itu sendiri untuk mengoperasikan perangkat desa, meningkatkan kinerja perangkat desa, dan menjadikan penggunaan sistem lebih efisien dan efektif. Pengembangan aplikasi siskeudes ini direncanakan agar desa-desa di Indonesia dapat mengimplementasikan aplikasi ini dalam sistem keuangan desa agar tidak terjadi kecurangan yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sebagai sistem informasi akuntansi, dikemas dalam sebuah sistem aplikasi untuk membantu pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip penggunaan aplikasi siskeudes yang efektif sangat penting untuk penggunaan keuangan desa. Gunakan bersama dengan rencana pertanggungjawaban yang tepat waktu, akurat, transparan, dan akuntabel sesuai kebutuhan. Adanya sistem keuangan di tingkat desa dapat mendorong pengelolaan keuangan di tingkat desa, mulai dari pendaftaran,

pengelolaan dan dukungan pengelolaan keuangan di tingkat desa, termasuk penciptaan dana di tingkat desa.

Penelitian serupa dengan variabel penggunaan siskeudes dilakukan oleh Maharini (2019), Assyahri (2019) dan Juardi (2018) dengan hasil penelitian yang membuktikan adanya keberhasilan pengelolaan dana desa terpengaruh oleh adanya penggunaan siskeudes. Namun berbeda dengan hasil (Amalya et al., 2017), keberhasilan pengelolaan dana tingkat desa tidak dipengaruhi oleh pengelolaan dana tingkat desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa adalah munculnya pemimpin yang berwenang.. Salah satu keberhasilan pengelolaan dana desa pemimpin harus memeiliki sikap *empowering* yang tinggi dengan begitu keberhaslan kinerja pemerintah desa dapat dicapai sesuai dengan tujuan. Kabupaten Tabanan belum sepenuhnya memiliki pemimpin dengan sifat yang *empowering.* Kurangnya pemimpin yang mampu memberdayakan anggotanya dengan baik sehingga tidak tercapainya tujuan dari organisasi tersebut.

Empowering leadership adalah proses pemberdayaan yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan. Akibatnya, dapat digunakan sebagai sumber motivasi bagi karyawan untuk mengelola pekerjaan mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka. Selanjutnya, penggerak utama pengelolaan dana di tingkat desa adalah pemerintah di tingkat desa.

desa harus mampu mendorong aparat desa dan masyarakat untuk bersama-sama mengelola dana desa. Komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa

dapat mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan pemerintah desa dan masyarakat desa.

Sun *et al* (2012) bahwa *empoering* ialah perilaku pemimpin yang mencakup pentingnya pekerjaan, berpartisipasi pengambilan keputusan, memiliki keyakinan pada bawahannya, dimana perilaku ini relevan dengan kreativitas. *Empowering Leadeship* merupakan Tindakan yang dapat berbagi kekuasaan dengan bawahan dan meningkatkan motivasi inti mereka. Contoh pemimpin yang membuat keputusan partisipatif, melatih, menginformasikan dan mengkomunikasikan keprihatinan mereka kepada pendukung mereka. Menurut Zhang dan Bartol (2010), pemberdayaan kepemimpinan adalah proses yang membuat karyawan memenuhi syarat untuk menggunakan kekuatan yang berbeda dan menunjukkan pentingnya pekerjaan. Artinya, mempertimbangkan kemampuan karyawan untuk menghindari hambatan pencapaian dan menawarkan otonomi yang lebih besar. Mencapai kinerja di tempat kerja. Bagian penting dari pemberdayaan kepemimpinan adalah memungkinkan tim untuk bekerja sama sebagai sebuah tim dan mengembangkan keterampilan manajemen diri dan kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja.

Penelitian ini merupakan evolusi dari Maharani Research (2019) tentang dampak partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, kemampuan mendukung desa, dan upaya pemerintah daerah untuk berhasil mengelola dana desa. Peneliti memilih variabel partisipasi masyarakat dan penggunaan sistem keuangan desa karena fenomena Kabupaten Tabanan. Penelitian ini menggunakan teori manajemen sebagai grand theory. Teori manajemen menggambarkan situasi di mana manajemen tidak diatur oleh tujuan pribadi, tetapi difokuskan pada tujuan hasil akhir untuk kepentingan organisasi.

Untuk mencapai pengelolaan dana desa yang baik dan benar, desa didukung oleh pimpinan yang berwenang, karena pimpinan memegang peranan penting dalam organisasi dan akan mempengaruhi keberhasilan dan kinerja pengelolaan desa. Tanggung jawab. Ketika kader desa menerapkan sistem keuangan tingkat desa dalam pengelolaan anggaran, mereka harus melakukan yang terbaik untuk memberikan informasi yang memadai dan mengusulkan rencana desain keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip panduan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana di tingkat desa sangat penting, agar penggunaan dan pengelolaan dana dapat lebih spesifik dan efeknya lebih nyata.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu proyek yang disebut **"Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Dan *Empowering Leadership* Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa Se-Kabupaten Tabanan."**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Tabanan lemah dalam hal pengelolaan dana desa dapat menghambat keberhasilan pengelolaan dana desa, padahal salah satu tujuan konservasi dana desa adalah untuk memberdayakan masyarakat.
2. Efektivitas penerapan sistem keuangan desa yang belum maksimal di Kabupaten Tabanan, sehingga menyebabkan keterambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga menyebabkan tidak maksimalnya dalam pengelolaan dana desa

3. Kurangnya pemimpin yang diberdayakan secara aktif menyebabkan kinerja pegawai yang kurang baik, yang dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana di Desa Kabupaten Tabanan.
4. Adanya kasus penggelapan dana desa di Kabupaten Tabanan yang menghambat keberhasilan pengelolaan dana desa.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membatasi pertanyaan yang akan diteliti sesuai dengan tujuan peneliti. Peneliti membatasi permasalahan pada masalah yang berkaitan dengan dampak partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, dan *empowering leadership* dalam keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan Dana Desa Kabupaten Tabanan?
2. Bagaimana pengaruh penggunaan sistem keuangan desa terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan?
3. Bagaimana pengaruh kepemimpinan yang berwenang terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa Kabupaten Tabanan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dampak pelibatan masyarakat terhadap keberhasilan pengelolaan dana di Desa Bupati Tabanan.
2. Membahas bagaimana sistem keuangan desa mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan.

3. Menganalisis bagaimana pengaruh kepemimpinan yang berwenang terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa Kabupaten Tabanan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a) Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini memungkinkan penulis dan pembaca biasa untuk lebih memahami dampak partisipasi masyarakat, penggunaan sistem keuangan desa, dan penguatan kepemimpinan untuk berhasil mengelola dana desa di Kabupaten Tabanan.

b. Hasil penelitian ini juga harus berkontribusi pada pengembangan literatur dan penelitian serupa

b) Manfaat Praktis

a. Bagi Desa

Mohon petunjuk dan informasi lainnya kepada aparat desa tentang keberhasilan pengelolaan dana desa Kabupaten Tabanan.Bagi

b. Universitas Pendidikan Ganesha

Selain sertifikat bibliografi yang dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat pengelola dana desa yang lebih luas dan dapat dijadikan sebagai tambahan pertimbangan dan ide dalam penelitian selanjutnya di wilayah yang sama.